

ABSTRAK

Hukum Islam merupakan hukum yang hidup dan inheren dengan kehidupan masyarakat Indonesia, Presiden Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan keputusan bersama yang di dalamnya terdapat panitia perdata, serta merancang Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan, Waris Dan Wakaf, yang kemudian akan digunakan oleh Pengadilan Agama untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Kompilasi Hukum Islam telah melahirkan nuansa baru didalam hukum nasional. dalam hukum Islam diatur tentang kekayaan, masalah pemberian harta kepada orang lain, baik itu Warisan, Hibah atau Wasiat. dikatakan bahwa hibah merupakan sarana menjalin hubungan sosial atau persaudaraan antara sesama. fungsi utama hibah adalah untuk mendorong persaudaraan, tetapi tidak jarang sengketa hibah atau pengalihan tanah diselesaikan di pengadilan. Kasus sengketa hibah merupakan kasus yang diajukan dua kali oleh pihak penggugat karna yang pertama kasusnya pernah ditolak oleh pengadilan agama sumenep. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kasus tersebut, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 625/pdt.G/2020/PA.smp Tentang Sengketa Hibah? Dan 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 625/hpdt.G/2020/PA.smp Tentang Sengketa Hibah?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu putusan Nomor 625/Pdt.G/2020/PA.Smp. dan sumber data sekunder yang didapatkan melalui literatur kepustakaan serta informasi dari pihak Pengadilan Agama Sumenep yang mana digunakan untuk mendukung sumber data sekunder. Dengan tiga tahapan pengumpulan data yaitu editing (pemeriksaan data), organizing, dan analyzing serta menggunakan analisis data melalui teknik deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Sumenep terhadap sengketa hibah no. 625/pdt.G/2020/PA.Smp akta hibah tanah dengan no. 82/PPAT KLGT/XII/1990 pada tanggal 3 desember 1990 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau dibatalkan pasalnya mengandung unsur kecurangan dalam proses penghibahan. Putusan yang dilakukan Pengadilan Agama Sumenep telah sesuai dengan Undang Undang yang berlaku serta putusan tersebut telah sesuai dan sejalan dengan teori Hukum Islam maupun Syari'at Islam yang mana untuk memberikan kemanfaatan serta mencegah kemudharatan.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Hibah, Putusan*

ABSTRACT

Islamic law is a living law that is inherent in the lives of Indonesian people, the President of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Minister of Religion of the Republic of Indonesia issued a joint decision in which there is a civil committee, and drafted the Compilation of Islamic Law on Marriage, Inheritance and Endowments, which will then be used by Religious Courts to carry out their duties and authorities. The Compilation of Islamic Law has given birth to new nuances in national law in Islamic law which regulates wealth, the issue of giving property to others, be it inheritance, grants or wills. It is said that grants are a means of establishing social or fraternal relations between fellow grantees. The main function of grants is to encourage brotherhood, but it is not uncommon for grant disputes or land transfers to be resolved in court. Sumenep religious court. Therefore, researchers are interested in conducting research related to the case. The purpose of this study is to answer the questions: 1) What is the Decision of the Sumenep Religious Court Number 625/ pdt.G/2020/PA.smp Regarding the Grant Dispute? And 2) What is the Review of Islamic Law on the Decision of the Sumenep Religious Court Number 625/ pdt.G/2020/PA.smp Regarding the Grant Dispute?

This research is a library research using qualitative research methods. The data source used is the primary data source, namely the decision Number 625/Pdt.G/2020/PA. Smp, and secondary data sources obtained through the literature and information from the religious courts. Sumenep which is used to support secondary data sources. With three stages of data collection, namely editing (data checking), organizing and analyzing and using data analysis through descriptive techniques.

Based on the analysis used, it can be concluded that the decision of the Sumenep religious court on the grant dispute No. 625/Pdt.G/2020/PA.Smp land grant deed with No. 82/PPAT KLGT/XII/1990 on December 3, 1990 was declared to have no legal force or was cancel because the article contained elements of fraud in the grant process. The decision made by the Sumenep religious court was in accordance with the applicable law and the decision was in accordance with and in line with the theory Of Islamic Law And Islamic Shari'ah which is to provide benefits and prevent harm.

Keywords: Islamic Law, Grants, Decisions

